



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	
9	Pajak Alat Berat-LO		-	-	-	
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)- LO		-	-	-	
11	Retribusi Daerah - LO		4.857.733.625,00	4.440.420.000,00	417.313.625,00	9,40
12	Retribusi Jasa Umum - LO		-	1.990.420.000,00	(1.990.420.000,00)	(100,00)
13	Retribusi Jasa Usaha - LO		4.857.733.625,00	2.450.000.000,00	2.407.733.625,00	98,27
14	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	
15	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	
19	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		34.476.647.800,00	32.488.508.280,00	1.988.139.520,00	6,12
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	
21	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	
23	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	
24	Jasa Giro - LO		-	-	-	
25	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	
26	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	
28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		34.462.553.400,00	32.476.216.700,00	1.986.336.700,00	6,12
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		14.094.400,00	12.291.580,00	1.802.820,00	14,67
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	
34	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	
35	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	
37	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	
41	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		-	-	-	
43	Pendapatan Konsesi Jasa		-	-	-	
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO		-	-	-	
45	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO		-	-	-	
46	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO		-	-	-	
47	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO		-	-	-	

48	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		39.334.381.425,00	36.928.928.280,00	2.405.453.145,00	6,51
49						
50	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
51	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	
52	Dana Perimbangan- LO		-	-	-	
53	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	
54	Insentif Fiskal-LO		-	-	-	
55	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		-	-	-	
56	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		-	-	-	
57	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		-	-	-	
58	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	
59	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	
60	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	
61	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	
62						
63	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
64	Pendapatan Hibah- LO		-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
65	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	
66	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	
67	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-	
68	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO		-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
69	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO		-	-	-	
70	Dana Darurat- LO		-	-	-	
71	Dana Darurat- LO		-	-	-	
72	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	
73	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	
74	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		-	-	-	
75	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO		-	-	-	
76	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat- LO		-	-	-	
77	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO		-	-	-	
78	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO		-	-	-	
79	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
80						
81	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO		39.334.381.425,00	36.968.928.280,00	2.365.453.145,00	6,40
82						
83	BEBAN					
84	BEBAN OPERASIONAL					
85	Beban Pegawai		43.130.299.578,00	43.726.803.656,00	(596.504.078,00)	(1,36)
86	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		21.028.782.710,00	19.712.377.249,00	1.316.405.461,00	6,68
87	Beban Tambahan Penghasilan ASN		22.101.516.868,00	23.337.876.407,00	(1.236.359.539,00)	(5,30)
88	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	676.550.000,00	(676.550.000,00)	(100,00)
89	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	
90	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	
91	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	
92	Beban Pegawai BOS		-	-	-	
93	Beban Pegawai BOSP		-	-	-	
94	Beban Pegawai BLUD		-	-	-	
95	Beban Barang dan Jasa		168.132.158.705,55	138.691.174.609,37	29.440.984.096,18	21,23
96	Beban Barang		32.375.235.852,80	4.890.402.154,00	27.484.833.698,80	562,02
97	Beban Jasa		129.132.175.501,75	125.268.067.164,37	3.864.108.337,38	3,08
98	Beban Pemeliharaan		4.312.340.791,00	3.696.760.340,00	615.580.451,00	16,65
99	Beban Perjalanan Dinas		2.294.406.560,00	4.817.944.951,00	(2.523.538.391,00)	(52,38)
100	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
101	Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-	
102	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	
103	Beban Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	
104	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	
105	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	
106	Beban Bunga		-	-	-	
107	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	
108	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	
109	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	
110	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	
111	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	
112	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	
113	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-	-	
114	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-	-	

115	Beban Subsidi		-	-	-	
116	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	
117	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	
118	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	
119	Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	
120	Beban Hibah		-	-	-	
121	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	
122	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	
123	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	
124	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	
125	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	
126	Beban Hibah Dana BOS		-	-	-	
127	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	
128	Beban Hibah Dana BOSP		-	-	-	
129	Beban Hibah kepada BUMDesa		-	-	-	
130	Beban Hibah kepada Koperasi		-	-	-	
131	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	
132	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	
133	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	
134	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	
135	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	
136	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	
137	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah		-	-	-	
138	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		-	-	-	
139	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	
140	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	
141	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	
142	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-	-	
143	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		-	-	-	
144	Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.794.886.169,39	9.221.460.087,86	573.426.081,53	6,22	
145	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.329.085.908,04	2.815.084.079,12	514.001.828,92	18,26	
146	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.250.828.027,65	3.139.093.844,99	111.734.182,66	3,56	
147	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.146.146.167,61	3.205.064.133,55	(58.917.965,94)	(1,84)	
148	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
149	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	
150	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	58.884.108,75	57.247.051,53	1.637.057,22	2,86	
151	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	9.941.957,34	4.970.978,67	4.970.978,67	100,00	
152	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-	
153	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	
154	Beban Imbalan	-	-	-	-	
155	Beban Imbalan Sukuk Daerah	-	-	-	-	
156	Jumlah Beban Operasional	221.057.344.452,94	191.639.438.353,23	29.417.906.099,71	15,35	
157						
158	BEBAN TRANSFER					
159	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-	
160	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-	
161	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
162	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	
163	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
164	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
165	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	
166	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-	
167	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
168	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-	
169						
170	JUMLAH BEBAN	221.057.344.452,94	191.639.438.353,23	29.417.906.099,71	15,35	
171						
172	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(181.722.963.027,94)	(154.670.510.073,23)	(27.052.452.954,71)	17,49	
173						
174	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
175	SURPLUS NON OPERASIONAL					
176	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-	
177	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	
178	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	
179	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	-	-	-	-	
180	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-	
181	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-	
182	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-	

183	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO		-	-	-	
184	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO		-	-	-	
185	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah		-	-	-	
186	Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah		-	-	-	
187	Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah		-	-	-	
188	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.566.920.854,46	-	1.566.920.854,46		
189	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.566.920.854,46	-	1.566.920.854,46		
190	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-		
191	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	-	-	-		
192	Jumlah Surplus Non Operasional	1.566.920.854,46	-	1.566.920.854,46		
193						
194	DEFISIT NON OPERASIONAL					
195	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	452.296.882,97	(452.296.882,97)	(100,00)	
196	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	-	452.296.882,97	(452.296.882,97)	(100,00)	
197	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-		
198	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-		
199	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-		
200	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-		
201	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-		
202	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-		
203	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-		
204	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah	-	-	-		
205	Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah	-	-	-		
206	Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah	-	-	-		
207	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-		
208	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-		
209	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-		
210	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-		
211	Jumlah Defisit Non Operasional	-	452.296.882,97	(452.296.882,97)	(100,00)	
212						
213	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.566.920.854,46	(452.296.882,97)	2.019.217.737,43	(446,44)	
214						
215	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(180.156.042.173,48)	(155.122.806.956,20)	(25.033.235.217,28)	16,14	
216						
217	POS LUAR BIASA					
218	BEBAN LUAR BIASA			-		
219	Beban Luar Biasa	-	-	-		
220	Beban Tidak Terduga	-	-	-		
221	Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-		
222	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-		
223						
224	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-		
225						
226	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(180.156.042.173,48)	(155.122.806.956,20)	(25.033.235.217,28)	16,14	

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
NIP. 19660801 199603 1 004